

BAB 6

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara

6.1 Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi

Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah. Untuk mencapai tujuan dan kebijakan serta strategi penataan ruang provinsi, maka arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dalam mewujudkan struktur ruang dan pengembangan pola ruang wilayah dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya. Program pemanfaatan ruang disusun dalam bentuk Indikasi program lima tahunan.

6.1.1 Arahan Pemanfaatan Kawasan Lindung

Arah pemanfaatan kawasan lindung ditujukan untuk upaya pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan dalam mewujudkan proporsi kawasan lindung sebesar 30% dengan mempertimbangkan keserasian antara kawasan lindung dan budidaya.

6.1.2 Arahan Pemanfaatan Kawasan Budidaya

Arah pemanfaatan kawasan budidaya ditujukan untuk dapat mengembangkan kegiatan pemanfaatan ruang wilayah yang optimal didukung oleh kemampuan struktur ruang wilayah provinsi dengan pertimbangankan keserasian antara kawasan lindung dan budidaya provinsi

6.2 Keterkaitan Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka rencana pembangunan diarahkan secara sistematis dalam kurun waktu jangka panjang (20 tahunan) yang dirinci dalam kurun waktu jangka menengah (5 tahunan) dan lebih dirinci dalam rencana pembangunan tahunan, baik dalam skup nasional, provinsi, maupun kabupaten dan atau kota. Rencana pembangunan tersebut secara matra ruang direncanakan dalam rencana tata ruang umum (RTRW) dan apabila diperlukan disusun rencana rincinya baik dalam skup nasional, provinsi maupun kabupaten dan atau kota, dan secara khusus disusun rencana kawasan-kawasan strategisnya.

6.3 Indikasi Program Jangka Menengah

Rencana struktur tata ruang dan pola ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara diwujudkan melalui kegiatan pemanfaatan ruang yang meliputi program, kegiatan dan tahapan pelaksanaannya. Penyusunan indikasi program didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berikut :

- 1. Tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan ruang wilayah provinsi.
- 2. Skenario dan tahapan pelaksanaan dan pengembangan.
- 3. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam hal pembiayaan pembangunan.

Untuk mewujudkan struktur ruang yang dituju diperlukan waktu selama masa perencanaan. Skenario dan tahapan pengembangan telah ditetapkan sebagai dasar bagi kerangka waktu pencapaian tujuan pengembangan tata ruang yang diharapkan.

Indikasi program untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

6.4 Pendanaan dan Institusi Pelaksana

Pelaksanaan strategi pengembangan ruang menuntut dukungan pendanaan dan pembiayaan dimana pembiayaan pembangunan bergantung pada kemampuan Pemerintah Provinsi. Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerja sama pendanaan.

Dalam menghimpun dana untuk pelaksanaan indikasi program jangka menengah dan adanya keterbatasan dana yang mampu dihimpun oleh Pemerintah Provinsi, maka disusun prioritas program pengembangan. Adapun perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain dari itu, terbukanya peluang Kerja sama pendanaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Tabel 6-1 Indikasi Program Kegiatan Pembangunan

NO	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOK	KASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG PROVINSI								
Α	PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN PROVINSI								
A.1	Percepatan Pengembangan Sistem Perkotaan	Lampiran II		APBN,	Bappeda, Distarukim				
A.2	Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan	Tabel Rencana Pen	gembangan Sistem	APBD,	Bappeda,				
	kota-kota sebagai pusat pertumbuhan wilayah dan pusat pelayanan	Perkot aan Provinsi Suma	tera l Itara	Investasi Swasta	Distarukim, Dinas Perhubungan, Dinas				
	Pemantapan fungsi kota yang telah berkembang	aan i Tovinsi Suma	icra Otara	dan/atau	Bina Marga, PSDA,				
a.	menurut hirarkinya			Kerjasama	Diskominfo,				
b.	Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi dan pengembangan baru kota menurut hirarkinya			Pendanaan	Distamben, BLH, Badan				
C.	Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan				Penanggulangan				
0.	sarana dan prasarana perkotaan sesuai sistem				Bencana Daerah				
	perkotaan (transportasi, energi, telekomunikasi,								
	jaringan sumber daya air, jaringan prasarana								
	lingkungan)								
A.3	Rehabilitasi dan pengendalian kota-kota								
	berbasis mitigasi bencana								
A.4	Pengembangan/Peningkatan kapasitas								
	kelembagaan bagi pengelolaan perkotaan								
A.5	Penyusunan rencana rinci sebagai operasional								
	pengelolaan perkotaan								
В	PERWUJUDAN SISTEM TRANSPORTASI								
	PROVINSI								
B.1	TRANSPORTASI DARAT								
a.	Jaringan Jalan Nasional yang ada dalam			APBN,	Bappeda, Dinas				
	Wilayah Provinsi			APBD,	Perhubungan, Dinas				

NO	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
a.1	Pemantapan jaringan jalan arteri primer, kolektor primer K-1, strategis nasional yang ada dalam wilayah provinsi	Lampiran III Tabel Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi	Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Bina Marga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, PT KAI, Kementerian PU, Kementerian				
a.2	Pengembangan jaringan jalan arteri primer, kolektor primer K1, strategis nasional yang ada dalam wilayah provinsi			Perhubungan				
b	Jaringan Jalan Provinsi							
b.1	Pemantapan jaringan jalan kolektor primer K2-/K-3 dan jalan strategis provinsi	Lampiran III Tabel Rencana Pengembangan						
b.2	Pengembangan jalan kolektor primer K-2/K-3 dan jalan strategis provinsi yang menghubungkan antar kota	Jaringan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi						
С	Jaringan Jalan Bebas Hambatan							
c.1	Pemantapan Jaringan Jalan Bebas Hambatan	Lampiran III Tabel Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi						
c.2	Pengembangan Jaringan Jalan Bebas Hambatan	Lampiran III Tabel Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi						
d	Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota, Perkotaan, dan Bandar Udara/Pelabuhan/Kawasan Industri							

NO	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
d.1	Pemantapan dan Pengembangan Jalur Kereta Api Antar Kota dan Perkotaan	 Ruas bagian timur: Batas Aceh – Besitang – Binjai – Medan – Lubuk Pakam – Tebingtinggi – Kisaran – Rantauprapat - batas Riau. Ruas Tebing Tinggi – Pematang Siantar Kisaran – Tanjungbalai Merek – Pematangsiantar Jaringan rel di kawasan Mebidangro: Belawan-Stasiun Kota; Stasiun Kota – Batang Kuis – Lubuk Pakam; Stasiun Kota – Sunggal – Binjai; Stasiun Kota – Pancur Batu; Lubuk Pakam – Galang; Aras Kabupatenu – Bandara Kualanamu; Stasiun Kota- Deli Tua; Deli Tua - Sibolangit 						
d.2	Pengembangan Jalur Kereta Api Antar Kota	 Ruas bagian barat: batas Aceh – Sibolga – batas Sumatera Barat. Ruas bagian tengah utara : Rantauprapat – Gunung Tua – Padangsidimpuan – Sibolga 						
d.3	Pengembangan Jalur Kereta Api menuju dan dari Bandar Udara/Pelabuhan/Kawasan Industri	 Ruas Medan - pelabuhan Belawan – Gabion (Pelabuhan Peti Kemas) Bandar Tinggi – Pelabuhan Kuala Tanjung, Kisaran – Pelabuhan Tanjung Tiram, Rantauprapat – Aek Nabara – Negeri Lama – Labuhan Bilik, Perlanaan – Gunung Bayu (Sei Mangkei), Aras Kabupatenu – Bandara Kuala Namu. 						

NO	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
d.4	Pengembangan simpul kereta api di stasiun kereta api	Kota Medan, Sibolga, Pematangsiantar, Tebingtinggi, Kisaran dan Rantauprapat.						
d.5	Pengembangan perpotongan antara jalur kereta api dan jalan yang tidak sebidang	Jalur kereta api antar kota dan wilayah perkotaan						
е	Perwujudan Sistem Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan							
e.1	Pengembangan/Peningkatan jaringan pelayanan angkutan penyeberangan lintas negara	Belawan – Malaysia Tanjungbalai – Malaysia						
e.2	Pengembangan/Peningkatan jaringan pelayanan angkutan penyeberangan lintas provinsi	Gunungsitoli – Singkil Pulau Telo –Teluk Bayur Medan – Batam Medan – Lhokseumawe Medan – Pangkalpinang						
e.3	Pengembangan/Peningkatan jaringan pelayanan angkutan penyeberangan lintas Kabupaten/kota	 Sibolga – Gunungsitoli Sibolga – Teluk Dalam Sibolga - Teluk Dalam – Pulau-pulau Batu 						
e.4	Pengembangan/Peningkatan jaringan pelayanan angkutan sungai dan danau lintas Kabupaten/kota	 Belawan Lama – Batang Sere Belawan Lama – Karang Gading Tanjungbalai - Asahan Ajibata – Tomok; Ajibata – Urat; Ajibata – Porsea; Balige – Onan Runggu Simanindo – Tigaras Balige – Mogang; Balige – Bakkara; Balige – Ajibata; Balige – Pangururan; Muara – Nainggolan Muara – Balige; Muara – Tomok; Muara – Bakkara; Muara – Onan Runggu 						
f	Perwujudan Sistem Angkutan, Terminal Penumpang serta Terminal Barang							
f.1	Pemantapan dan Pengembangan terminal barang	Lampiran IV.A Tabel Rencana Pengembangan Terminal Angkutan Barang						

NO	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana		5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
f.2	Pemantapan dan Pengembangan terminal penumpang tipe A dan B	Lampiran IV.B Tabel Rencana Pengembangan Terminal Angkutan Penumpang							
f.3	Pemantapan dan pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis jalan (Bus Rapid Transit)	Kawasan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo							
f.4	Pemantapan dan Pengembangan angkutan pemadu moda melalui moda angkutan darat, kereta api, dan angkutan laut	Bandara Kuala Namu	_						
f.5	Pemantapan dan Pengembangan fasilitas alih moda (transfer point) untuk angkutan pemadu moda	Bandara Kuala Namu							
f.6	Pemantapan dan Pengembangan pelayanan angkutan penumpang	Jalur susur lintas pantai timur							
B.2	TRANSPORTASI LAUT								
a.	Pemantapan pelayanan pelabuhan utama	Lampiran V	APBN,	Bappeda, D	Dinas				
b.	Pengembangan /Peningkatan pelayanan pelabuhan pengumpul menuju pelabuhan utama/internasional	Tabel Rencana Pengembangan Tatanan Kepelabuhan Provinsi Sumatera Utara	APBD, Perhubungan, PT Investasi Pelindo, Swasta Kementerian dan/atau Perhubungan Kerjasama	Pelindo, Kementerian	PT				
C.	Pengembangan/Peningkatan pelayanan pelabuhan pengumpan regional								
d.	Pengembangan/Peningkatan pelayanan pelabuhan pengumpan lokal		Pendanaan						
e.	Pengembangan/Peningkatan angkutan laut dengan waterbus	Sepanjang pesisir pantai timur Sumatera Utara							
f.	Pengembangan/Peningkatan pelabuhan untuk mendukung angkutan laut di sepanjang pesisir pantai timur Sumatera Utara	Sepanjang pesisir pantai timur Sumatera Utara							
B.3	TRANSPORTASI UDARA								
a.	Pengembangan/Peningkatan Bandar Udara Pengumpul /Skala primer	Lampiran VI Tabel Rencana Pengembangan Tatanan Kebandarudaraan Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD, Investasi Swasta	Bappeda, D Perhubungan	Dinas				
b.	Pengembangan/Peningkatan Bandar Udara Pengumpan		dan/atau						

NO	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
C.	Pengembangan/Peningkatan Baru Bandar Udara Baru	Bandar udara di Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Labuhanbatu	Kerjasama Pendanaan					
С	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI PROVINSI							
C .1	Pengembangan/Peningkatan Sistem Penyediaan dan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional gas jalur Duri – Dumai – Medan	Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Riau (Pertamina Sumbagut), Kawasan pesisir timur dan kawasan pantai barat yang potensial	dan/atau	Bappeda, Distamben, Pertamina, PLN, PN GAS, Kementerian ESDM				
C.2	Pemantapan dan Pengembangan terminal gas terapung	Kota Medan Kota Sibolga Kabupaten Batubara Kawasan pesisir timur dan kawasan pantai barat yang potensial	Kerjasama Pendanaan					
C.3	Pemantapan dan Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik							
a.	Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik yang telah beroperasi	Lampiran VII Tabel Rencana Pengembangan						
b.	Pemantapan dan Pengembangan pembangkit listrik baru	Pembangkit Listrik di Provinsi Sumatera Utara						
C.	Pemantapan dan Pengembangan sumber energi baru yang berbasiskan potensi panas bumi, tenaga hidro power, biomassa dan biogas	Wilayah Provinsi Sumatera Utara						
d.	Pemantapan dan Pengembangan sistem pembangkit mikrohidro, tenaga surya, tenaga angin dan tenaga diesel	Sistem jaringan terisolasi pada Pulau Berhala, pulau-pulau kecil atau gugus pulau serta kawasan terpencil dan pedalaman.						
C.3	Pemantapan dan Pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik							
a.	Pemantapan dan Pengembangan sistem jaringan interkoneksi se Sumatera dan sistem energi Asean	Wilayah Provinsi Sumatera Utara						
b.	Pengembangan sistem jaringan transmisi SUTET dan SUTUT	Wilayah Provinsi Sumatera Utara						

NO	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
D.	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI							
D.1	Rehabilitasi dan Pengembangan Jaringan Terestrial	Wilayah Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD, Investasi Swasta	Bappeda, Dinas Perhubungan, Diskominfo, Penyedia Jasa				
a.	Rehabilitasi dan pengembangan sistem jaringan terestrial Kabupatenel serat optik	Kawasan perkotaan PKN Mebidangro	dan/atau Kerjasama	Telekomunikasi, Kementerian				
b.	Pemantapan dan pengembangan sistem jaringan teresterial Kabupatenel dan nirKabupatenel	Jaringan pusat pelayanan wilayah pantai timur dan pantai barat	Pendanaan	Kominfo				
C.	Pemanfaatan jaringan terestrial sistem nirKabupatenel dengan penutupan wilayah blankspot	Wilayah berbukit, pegunungan atau wilayah terpencil di Sumatera Utara						
D.2	Rehabilitasi dan Pengembangan Jaringan Satelit]					
a.	Rehanilitasi dan pengembangan jaringan telekomunikasi satelit	PKW, kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan Pulau Berhala						
b.	Pembangunan dan pengembangan Stasiun Bumi	Kabupaten Karo dan wilayah yang bersesuaian						
C.	Pemantapan dan Pengembangan Menara Bersama Telekomunikasi	Kawasan perkotaan, daerah komersil, dan <i>blankspot</i> jaringan wilayah perdesaan						
d.	Penataan dan Pengelolaan lokasi BTS	Jaringan pusat pelayanan wilayah pantai timur dan pantai barat						
E.	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR (SDA) DAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR (SDA)							
E.1.	Pengembangan konservasi SDA melalui perlindungan dan pelestarian jaringan sumber daya air, pengawetan air, pengelolaan kualitas SDA dan pengendalian pencemaran SDA;	SDA yang terletak pada kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya dan kawasan perlindungan setempat	APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama	Bappeda, Dinas PSDA, Badan Ketahanan Pangan Daerah, Kementerian PU				

NO	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
			Pendanaan					
E.2	Pengembangan pendayagunaan dan penyediaan SDA berbasiskan DAS penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembanganan pengusahaan SDA							
a.	Pengembangan Pola Pengelolaan WS	Lampiran VIII Tabel Rencana Pengembangan Wilayah Sungai (WS) Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD, Investasi Swasta	Bappeda, Dinas PSDA, Badan Ketahanan Pangan Daerah, Distamben,				
b.	Pengembangan Pola Pengelolaan Cekungan Air Tanah	Lampiran IX Tabel Rencana Pengembangan Cekungan Air Tanah (CAT) di Provinsi Sumatera Utara	dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian PU				
C.	Pengembangan pola pengelolaan badan air	Danau Toba, Danau Siais, Danau Balimbing, Danau Lau Kawar, Danau Sidihoni, dan Danau Aek Natonang						
d.	Pengembangan sumber daya air pada kawasan rawa	Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Tapanuli Utara						
e.	Pengembangan pengelolaan sumber mata air	Seluruh Kabupaten/kota Sumatera Utara						
E.3	Pengelolaan pada pengendalian daya rusak air dengan penanggulangan, pemulihan kualitas	SDA yang terletak pada pada Kawasan yang memberikan	APBN, APBD,	Bappeda, Dinas PSDA, Badan				

NO	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
	lingkungan dan pemulihan jaringan SDA dan prasarana SDA yang rusak	perlindungan di bawahnya dan Kawasan Perlindung Setempat • WS Strategis Belawan – Ular – Padang, WS Toba – Asahan, WS Batang Angkola -Batang Gadis.	Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Ketahanan Pangan Daerah, Kementerian PU				
E.4	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air							
а	Rehabilitasi, peningkatan pelayanan prasarana dan sarana waduk dan bendungan serta bendung	 Waduk Lau Simeme, Deli Serdang Bendungan Sigura-gura di Kabupaten Toba Samosir Lampiran X Tabel Rencana Pengembangan Bendung yang Ada Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara 	APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Bappeda, Dinas PSDA, Kementerian PU				
b.	Rehabilitasi, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana jaringan irigasi rawa	Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Utara						
C.	Rehabilitasi, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana jaringan irigasi sungai dan jaringan sda lainnya	Lampiran XI Tabel Daerah Irigasi di Provinsi Sumatera Utara						
d.	Rehabilitasi, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana situ/embung/waduk dan jaringan SDA lainnya	Lampiran XII Tabel Sarana Situ/Embung/Waduk di Provinsi Sumatera Utara						
E.5	Rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana penyediaan air baku/SPAM							
a.	Pemantapan SPAM yang telah ada baik jaringan dan non bukan jaringan	Kawasan permukiman wilayah Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD,	Bappeda, Dinas PSDA, PDAM,				

NO	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
b.	Pemantapan dan pengembangan SPAM Regional dengan sistem jaringan perpipaan	 Kawasan Medan – Binjai – Deli Serdang – Karo (Mebidangro), Kota Siboga – Kabupaten Tapanuli Tengah Kota Tebing Tinggi – Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjung Balai – Kabupaten Asahan, Kota Pematangsiantar – Kabupaten Simalungun, Kota Padangsidimpuan – Kabupaten Tapanuli Selatan Pulau Nias 	Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian PU				
C.	Pemantapan dan pengembangan SPAM dengan sistem jaringan perpipaan	kawasan permukiman , perkotaan dan pedesaan, kawasan pariwisata dan kawasan industri dan kawasan budidaya lainnya						
d.	Pemantapan dan pengembangan SPAM bukan jaringan	kawasan terpencil, pesisir dan pulau kecil terluar						
e.	Pengembangan kelembagaan badan layanan umum (BLU) SPAM	Wilayah Provinsi Sumatera Utara						
E.6	Rehabilitasi dan peningkatan sarana dan prasarana bangunan pengendali daya rusak air							
a.	Pemantapan normalisasi, penguatan tebing, pembuatan kolam retensi, dan pembuatan tanggul yang telah ada	 Kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan permukiman perkotaan perdesaan 	APBN, APBD, Investasi	Bappeda, Dinas PSDA, Badan Penanggulangan				
b.	Pemantapan sistem penanganan erosi dan longsor	 SDA yang terletak pada kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya dan kawasan perlindungan setempat Daerah rawan banjir dan pengamanan pantai Jaringan DAS Prov. Sumatera Utara 	Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Bencana Daerah, Kementerian PU, BNPB				
C.	Pemantapan sistem pengamanan abrasi pantai	Pantai Barus di Kabupaten Tapanuli Tengah, Pantai Natal di Kabupaten						

NO	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
		Mandailing Natal, Pantai Cermin di Kabupaten Serdang Bedagai, Pantai Kepulauan Nias, Pantai Kawasan Danau Toba serta pantai di pesisir timur Sumatera Utara						
E.7	Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir	kawasan permukiman perkotaan dan perdesaanWilayah Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD, Investasi	Dinas PSDA, Badan Penanggulangan Bencana Daerah,				
a.	Pemantapan dan pengembangan sistem jaringan drainase makro	Kawasan perkotaan yang terintegrasi dengan jaringan sumber daya air	Swasta dan/atau	,				
b.	Pemantapan dan pengembangan sistem jaringan drainase mikro	Kawasan permukiman bagian dari kawasan perkotaan	Pendanaan	DINFD				
C.	Pemantapan penyediaan sumur-sumur resapan dan kolam retensi	Kawasan perkotaan dengan ruang terbuka hijau kurang dari 30%						
E.8	Pengembangan Kelembagaan Pengelola Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Wilayah Provinsi Sumatera Utara		Dinas PSDA, Distarukim, Bappeda, PDAM				
F	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LINGKUNGAN							
F.1	Revitalisasi TPA yang telah ada	Pusat pertumbuhan dan permukiman perkotaan dan pedesaan	APBN, APBD, Investasi	Bappeda, Dinas Tarukim, BLH				
F.2	Pengembangan/Peningkatan TPA Regional	Lampiran XIII Tabel TPA Regional Provinsi Sumatera Utara	Swasta dan/atau Kerjasama					
F.3	Revitalisasi dan peningkatan kapasitas IPAL yang telah ada	Pusat pertumbuhan dan permukiman perkotaan dan pedesaan	Pendanaan					
F.4	Pengembangan Kelembagaan Pengelola Jaringan Prasarana Lingkungan	Wilayah Provinsi Sumatera Utara		Dinas Tarukim, BLH, Bappeda, Dinas PSDA, PDAM				
II	PERWUJUDAN POLA RUANG PROVINSI							
A.	PERWUJUDAN KAWASAN FUNGSI LINDUNG							
A.1	Penataan batas dan penetapan kawasan lindung	Kawasan dengan fungsi lindung di	APBN,	Biro Pemerintahan,				
a.	Penyelesaian Tata Batas wilayah Administrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	APBD,	Dinas Kehutanan, Bappeda,				

NO	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
b.	Perda tanah ulayat (penegasan hak keperdataan atas tanah di Sumatera Utara)		Kerjasama Pendanaan	Kementerian Dalam Negeri, BPN, Pemda				
C.	Penetapan tata batas kawasan hutan lindung			Kabupaten/Kota				
d.	Penetapan tata batas kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya							
e.	Penetapan tata batas kawasan yang memberikan perlindungan setempat							
f.	Penetapan tata batas kawasan yang memberikan perlindungan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya							
g.	Penetapan tata batas kawasan rawan bencana							
h.	Penetapan tata batas kawasan lindung geologi							
i.	Penetapan tata batas kawasan lindung lainnya							
A.2	Rehabilitasi dan Pemantapan fungsi kawasan	Kawasan dengan fungsi lindung di		Dinas Kehutanan,				
	lindung Konservasi dan rehabilitasi seluruh kawasan	Provinsi Sumatera Utara	APBD, Investasi	Dinas PSDA, Badan				
а.	lindung dan lahan kritis serta SDA		Swasta	Penanggulangan				
b.	Penyiapan dan pengelolaan kawasan evakuasi dan mitigasi bencana		dan/atau Kerjasama Pendanaan	Bencana Daerah, Bappeda, BMkG, Kementerian Kehutanan, BNPB, Kementerian PU, Pemda Kabupaten/Kota				
A.3	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Lindung		APBN, APBD,	Dinas Kehutanan, Dinas PSDA,				
a.	Identifikasi kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di kawasan lindung	Kawasan dengan fungsi lindung di Provinsi Sumatera Utara	Swasta	Badan Penanggulangan				
b.	Kerjasama lintas sektor dan atau daerah dalam pemanfaatan kawasan lindung	Kawasan dengan fungsi lindung di Provinsi Sumatera Utara	dan/atau Kerjasama Pendanaan	Bencana Daerah, Bappeda, BMKG, Kementerian Kehutanan, BNPB, Kementerian PU,				
C.	Pengembangan peluang pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan lindung	Kawasan dengan fungsi lindung di Provinsi Sumatera Utara		Pemda Kabupaten/Kota				
d.	Pengembangan kawasan RTH	Kecamatan Polonia, Kota Medan						

NO	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
A.4	Pengendalian pemanfaatan kawasan lindung	Kawasan dengan fungsi lindung di	APBN,	Kementerian				
a.	Pengendalian kegiatan budaya di sekitar kawasan fungsi lindung	Provinsi Sumatera Utara	APBD,	Kehutanan, Kementerian PU,				
b.	Pengembangan peran masyarakat dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung			Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota, Kepolisian				
C.	Peningkatan penegakan hukum dalam pengelolaan kawasan lindung							
В.	PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA PROVINSI							
B.1	PERWUJUDAN KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA HUTAN PRODUKSI	Lampiran XX Tabel Rencana Pengembangan	APBN, APBD,	Dinas Kehutanan, Kementerian				
a.	Tata Batas dan Penetapan Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi	Investasi Swasta	sta Kabupaten/Kota				
b.	Rehabilitasi Dan Pemantapan Fungsi Kawasan Hutan Produksi		dan/atau Kerjasama Pendanaan					
b.1	Rehabilitasi Fungsi Kawasan dan reboisasi lahan kritis Hutan Produksi			Pendanaan				
b.2	Pemantapan Fungsi Kawasan Hutan Produksi							
С	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi							
c.1	Pengembangan Kawasan Hutan Produksi							
c.2	Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi							
d.	Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi							
e.	Rehabilitasi dan pengembangan Kawasan Hutan Tanaman Rakyat	Kawasan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten/kota						
B.2	PERWUJUDAN KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA PERTANIAN							

NO	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
a.	Rehabilitasi / Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian		APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Pertanian, Dinas PSDA, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian PU				
b.	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pertanian		APBN, APBD,	Dinas Pertanian, Dinas PSDA, Badan				
b.1	Pengembangan Sentra Produksi AgropolitanDataran Tinggi Kawasan Pertanian	 Kecamatan Merek, Kabupaten Karo; Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara; Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan; Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir; Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir; Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun; Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi; Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat; dan Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar 	Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian PU				
b.2	Pemantapan Penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Tabel XXI Tabel Rencana Pengembangan Lahan Pertanian	APBN, APBD, Investasi	Dinas Pertanian, Dinas PSDA, Badan Ketahanan Pangan,				
C.	Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Pertanian		Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian Pertanian, Kementerian PU				

NO	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
B.3	PERWUJUDAN KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA PERKEBUNAN							
a.	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Perkebunan	Tabel XXII Tabel Rencana Pengembangan Lahan	APBN, APBD,	Dinas Perkebunan, Kementerian				
a.1	Pengembangan Kawasan Perkebunan berdasarkan komoditas	Perkebunan	Investasi Swasta	Pertanian, Kementerian PU				
a.2	Pengelolaan Kawasan Perkebunan berdasarkan komoditas		dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kerjasama				
b.	Pemantapan dan Pengembangan Taman Teknologi Tanaman Pertanian Perkebunan (Agrotechno Park)	Kawasan Sekitar Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang						
C.	Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Perkebunan	Wilyah Kabupaten Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Perkebunan, Kementerian Pertanian, Kementerian PU				
B.4	PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA PETERNAKAN							
a.	Pemantapan Fungsi Kawasan Peternakan	Wilayah Provinsi Sumatera Utara	APBN,	Dinas Peternakan,				
b.	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Peternakan yang terintegrasi dengan kawasan budidaya pertanian dan perkebunan dan perikanan budidaya	Wilayah Provinsi Sumatera Utara	APBD, Investasi Swasta dan/atau	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Kementerian Pertanian,				
b.1	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Peternakan hewan besar yang terintegrasi dengan kawasan budidaya pertanian dan perkebunan dan perikanan budidaya	Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padanglawas Utara, Kabupaten Padanglawas, Kabupaten	Kerjasama Pendanaan	Kementerian PU				

NO	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
		Mandailing Natal, dan Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, serta Samosir.						
b.2	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Peternakan hewan kecil yang terintegrasi dengan kawasan budidaya pertanian dan perkebunan dan perikanan budidaya	Wilayah Provinsi Sumatera Utara						
C.	Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Peternakan	Wilyah Provinsi Sumatera Utara						
B.5	PERWUJUDAN KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA PERIKANAN dan KELAUTAN							
a.	Rehabilitasi Dan Pemantapan Fungsi Kawasan Perikanan dan Kelautan	Kawasan Perikanan dan Kelautan di Kabupaten/kota	APBN, APBD,	Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas				
a.1	Rehabilitasi Fungsi Kawasan Perikanan dan Kelautan	·	Investasi Swasta	Pertanian				
a.2	Pemantapan Fungsi Kawasan Perikanan dan Kelautan		dan/atau Kerjasama Pendanaan					
b.	Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Kelautan		APBN, APBD,	Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas				
b.1	Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya	Kabupaten Toba Samosir, Simalungun, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Karo, Dairi, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Samosir, Mandailing Natal, dan Padang Lawas	Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Pertanian				
b.2	Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap	Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Asahan, Batubara, Tanjung Balai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, Kota Sibolga, Kota Medan						
b.3	Pengembangan pangkalan pendaratan ikan (PPI)	Tabel XXIII Tabel Rencana Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)						

NO	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
b.4	Pengembangan Kawasan Agromarinepolitan	Kawasan Sepanjang pesisir Pantai Barat dan Timur Provinsi Sumatera Utara						
C.	Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Perikanan dan Kelautan	Kawasan Perikanan dan Kelautan di Kabupaten/kota						
B.6	PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA PERTAMBANGAN	·						
a.	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Pertambangan	Kawasan pertambangan di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera	APBN, APBD,	Dinas Pertambangan,				
a.1	Rehabilitasi dan konservasi Fungsi Kawasan Pertambangan yang eksisting	Utara	Investasi Swasta	Dinas PU, Kementerian ESDM,				
a.2	Pemantapan Fungsi Kawasan Pertambangan		dan/atau	Kementerian PU				
b.	Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasan Pertambangan		Kerjasama Pendanaan					
b.1	Identifikasi Potensi Pertambangan							
b.2	Pengelolaan Kawasan Pertambangan							
C.	Pengendalian Pemanfaatan Kawasan							
	Pertambangan							
B.7	PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA PERINDUSTRIAN							
a.	Pemantapan Fungsi Kawasan Perindustrian	Tabel XXIV	APBN,	Disperindag,				
b.	Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasan Perindustrian	Tabel Rencana Pengembangan Kawasan Industri	APBD, Investasi	BUMN/BUMD, Dinas Koperasi & Usaha				
b.1	Pengembangan dan Pengelolaan kawasan Industri Mikro Kecil		Swasta dan/atau	Kecil Menengah, BPMP, Kementerian				
b.2	Pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri Menengah dan industri Besar		Kerjasama Pendanaan	Perindustrian, Kementerian				
b.3	Pengembangan dan Pengelolaan kawasan Industri Kawasan Ekonomi Khusus			Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,				
C.	Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Perindustrian			ВКРМ				
B.8	PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA PARIWISATA							
a.	Rehabilitasi Dan Pemantapan Fungsi Kawasan Pariwisata	Tabel XXV Tabel Rencana Pengembangan	APBN, APBD,	Dinas pariwisata, Dinas Kehutanan,				
a.1	Rehabilitasi Fungsi Kawasan Pariwisata dan Objek Wisata	Kawasan Pariwisata	Investasi Swasta	BPMP, Kementerian Pariwisata dan				

NO	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
a.2	Pemantapan Fungsi Kawasan Pariwisata dan Objek Wisata		dan/atau Kerjasama	Ekonomi Kreatif, BKPM				
b.	Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasan Pariwisata		Pendanaan					
b.1	Pengembangan Kawasan Pariwisata							
b.2	Pengelolaan Kawasan Pariwisata							
b.3	Penyusunan Perencanaan Induk Pariwisata Sumatera Utara							
C.	Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Pariwisata							
B.9	PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN							
a.	Rehabilitasi/Pemantapan Kawasan Permukiman di Perkotaan dan Perdesaan	Kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan di Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD,	Bappeda, Dinas Tarukim, BLH,				
b.	Pengembangan/Peningkatan Kawasan Permukiman di Perkotaan dan Perdesaan		Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian Perumahan Rakyat BPN, Kementerian PU				
III	PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS							
Α	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DI PROVINSI SUMATERA UTARA							
A.1	Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan strategis nasional dengan Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk pulau kecil terluar (Pulau Berhala) dengan negara India/Thailand/Malaysia	APBN, APBD, Investasi Swasta	Kementerian Pertahanan dan Instansi Terkait				
A.2	Rehabilitasi/Revitalisasi kawasan strategis nasional dengan Sudut Kepentingan Ekonomi	Kawasan Perkotaan Medan – Binjai – Deli Serdang – Karo (Mebidangro)	dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian Terkait Pengembangan Kawasan Berbasis Ekonomi				

NO	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
A.3	Rehabilitasi/Revitalisasi kawasan strategis nasional dengan Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup	Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya		Kementerian Negara dan Lingkungan Hidup				
В	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI		APBN, APBD, Investasi	Bappeda, Distarukim, Dinas Perhubungan, Dinas				
B.1	Rehabilitasi/Revitalisasi dan Pemantapan Kawasan	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batubara – Asahan meliputi:	Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Bina Marga, PSDA, Diskominfo, Distamben, Dinas perkebunan, Dinas Perindustrian, Dinas Peternakan, Dinas Pariwisata BLH, Dinas Perindustrian, Dinas Kehutanan,				

B.2 Pengembangan/peningkatan kualitas kawasan • Kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan, meliputi sentra produksi: • Merek, Kabupaten Karo; • Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara; • Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan; • Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir; • Harian, Kabupaten Samosir;	Pengembangan/peningkatan kualitas kaw	
Silimakuta, Kabupaten Simalungun; Silimakuta, Kabupaten Dairi; Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias; Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya; Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya meliputi: Kawasan Labuan Angin — Sibolga Kawasan Mandailing Natal — Tapanuli Selatan Kawasan Perkotaan Padangsidimpuan dan sekitarnya C PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN SOSIAL DAN BUDAYA	SUDUT KEPENTINGAN SOSIAL	

NO	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
C.1	Rehabilitasi/Revitalisasi dan Pemantapan Kawasan	Kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Mebidangro, meliputi: Situs dan peninggalan bersejarah di Kota Cina di Kota Medan dan Kota Rantang di Kabupaten Deli Serdang Bangunan bersejarah di Koridor Kota Lama Belawan dan Kota Lama Kesawan di Kota Medan; Bangunan bersejarah budaya Kesultanan Deli di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Kawasan religi dan situs Candi/Biara di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara; Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya; Kawasan religi dan situs bersejarah Islam di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah; Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit						
D	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN FUNGSI DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP							

NO	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
D.1	Rehabilitasi/Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan	 Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok; Kawasan Konservasi Hutan Batang Toru; dan Kawasan Konservasi Taman Nasional Batang Gadis 						